



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/86/WAKO-SWL/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk penyelenggaraan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengorganisasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan /atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
 - c. dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu; dan
 - d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Sawahlunto melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi *public*; dan

e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEENAM : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibantu oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

KETUJUJUH : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEENAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- menyelesaikan hal-hal yang belum diatur.

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini ditetapkan maka keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/192/WAKO-SWL/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 Februari 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

17 FEB 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
PJ. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

DERI ASTA



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Sumatera Barat di Padang;
- Ketua DPRD Kota Sawahlunto;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/86/WAKO-SWL/2020

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NO	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. 2.	Walikota Sawahlunto Wakil Walikota Sawahlunto	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Pengarah
4. 5. 6. 7. 8.	Asisten Adminitrasi Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Asisten Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Inspektur Daerah Kota Sawahlunto Seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto	Tim Pertimbangan
9. 10. 11. 12. 13.	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Informatika pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Kepala Sub Bagian Persandian pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi a. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa b. Bidang Dokumentasi dan Arsip c. Bidang Pengelola Informasi d. Bidang Pelayanan Informasi
14.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris pada Inspektorat Kota Sawahlunto - Sekretaris pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto - Sekretaris pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto - Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto - Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Sawahlunto - Sekretaris pada Kecamatan se-Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian 	PPID Pembantu

	<p>Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan Non Formal Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Pembangunan pada Bagian Statistik, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Statistik pada Bagian Statistik, Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Kepala Desa dan Lurah se-Kota Sawahlunto 	
15.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto - Staf pada Bagian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Humas Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 	Sekretariat

17 FEB 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



INDRA MULYONO, SH
NIP. 19820411 201001 1 014

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA